



## Transformasi Agraria: Alih Fungsi Lahan Pertanian dalam Perspektif Kesejahteraan Petani di Provinsi Sumatera Selatan

<sup>1</sup>Sudarti, <sup>2</sup>Aisah, <sup>3</sup>Serly Novita Sari

<sup>12</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Belitang, Kab.OKU Timur

<sup>3</sup>Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Univeritas Sriwijaya

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3060>

\*Correspondence: Sudarti

Email: [Sudartidh@yahoo.com](mailto:Sudartidh@yahoo.com)

Received: 12-11-2025

Accepted: 14-12-2025

Published: 28-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the impacts of agricultural land conversion on farmers' livelihoods and welfare, focusing on economic, social, and food security dimensions at the local level. The research employed a qualitative approach involving 30 informants consisting of farmers, community leaders, and village officials in areas affected by land conversion. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and reviews of relevant policy documents. The data were then analyzed thematically to identify patterns and interrelations among emerging social phenomena. The findings reveal three major impacts of land conversion. First, in the economic aspect, some farmers temporarily benefited from selling their land, but most lost their primary source of income after no longer owning productive land. Second, in the social aspect, land conversion altered farmers' identity and social status, as many shifted to become laborers on land they once owned. Third, in the food security aspect, the reduction of agricultural land led to decreased local food production capacity and increased dependence on external food supplies. Overall, agrarian transformation through land conversion tends to weaken rather than improve farmers' welfare. This situation is exacerbated by weak implementation of the Sustainable Agricultural Land Protection (LP2B) policy. Therefore, this study

recommends strengthening pro-farmer policies and implementing empowerment programs to enhance farmers' adaptive capacity in responding to land-use changes and to promote sustainable agricultural development.

**Keywords:** Land Conversion, Agrarian Transformation, Farmers' Welfare

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap kehidupan dan kesejahteraan petani, dengan menyoroti perubahan ekonomi, sosial, dan ketahanan pangan yang terjadi di tingkat lokal. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan melibatkan 30 informan yang terdiri atas petani, tokoh masyarakat, dan aparat desa di wilayah yang terdampak alih fungsi lahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antarfenomena sosial yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan tiga dampak utama dari alih fungsi lahan. Pertama, dari aspek ekonomi, sebagian petani memang memperoleh keuntungan sementara dari penjualan lahan, tetapi mayoritas kehilangan sumber pendapatan utama setelah tidak lagi memiliki lahan untuk berproduksi. Kedua, dari aspek sosial, terjadi perubahan identitas dan status sosial petani, di mana banyak yang beralih profesi menjadi buruh di lahan yang sebelumnya mereka miliki. Ketiga, dari aspek ketahanan pangan, berkurangnya lahan pertanian menyebabkan penurunan kapasitas produksi pangan lokal dan meningkatnya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar wilayah. Secara keseluruhan, transformasi agraria melalui alih fungsi lahan di kawasan penelitian cenderung melemahkan, bukan memperbaiki, kesejahteraan petani. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan yang berpihak pada petani serta program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas adaptif mereka dalam menghadapi perubahan penggunaan lahan secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Alih Fungsi Lahan, Transformasi Agraria, Kesejahteraan Petani, Ketahanan Pangan.

## Pendahuluan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi fenomena yang semakin nyata di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah dengan perkembangan industri dan pemukiman yang pesat. Menurut Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, laju alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian mencapai sekitar 102.000 hektar per tahun hanya di Provinsi Sumatera Selatan (Kementerian Pertanian RI, 2023). Secara nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa dalam kurun satu dekade terakhir Indonesia telah kehilangan sekitar 320.000 hektar sawah akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan pemukiman (KPK, 2021). Hal ini diperkuat oleh laporan Kementerian Pertanian dan DPR RI yang menyebutkan bahwa rata-rata alih fungsi lahan pertanian berada pada kisaran 90.000–100.000 hektar per tahun (DPR RI, 2023).

Temuan-temuan tersebut sejalan dengan penelitian **Rustiadi et al. (2018)** yang menjelaskan bahwa konversi lahan pertanian di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh tekanan ekonomi rumah tangga, peningkatan nilai jual tanah, serta lemahnya penegakan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Selain itu, **Sitorus dan Panuju (2020)** menegaskan bahwa alih fungsi lahan sering kali dipicu oleh ketimpangan antara kebutuhan pembangunan dan daya dukung ruang, di mana petani cenderung menjual lahannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek. Sementara itu, **Kustiawan et al. (2021)** menemukan bahwa di banyak daerah, perubahan fungsi lahan berimplikasi langsung terhadap penurunan ketahanan pangan lokal dan hilangnya lapangan kerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji dinamika sosial-ekonomi dari alih fungsi lahan pertanian di tingkat mikro wilayah, khususnya di Desa Rantau Kadam, dengan menyoroti bagaimana transformasi agraria tersebut memengaruhi kesejahteraan petani secara langsung.

Tekanan terhadap sektor pertanian juga tercermin dari statistik produksi pangan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa luas panen padi pada tahun 2023 mencapai 10,21 juta hektar dengan produksi gabah kering giling sebesar 53,98 juta ton (BPS, 2023). Namun, estimasi lahan baku sawah (LBS) periode Januari–Mei 2023 hanya tercatat sebesar 7,46 juta hektar, dengan luas tanam 3,65 juta hektar dan luas panen 4,41 juta hektar (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, 2023). Ketidakseimbangan antara ketersediaan lahan baku dan luas panen ini menunjukkan adanya tekanan struktural yang dialami sektor pangan. Selain itu, dinamika penguasaan lahan pertanian juga memperlihatkan kerentanan petani. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, terdapat 28,2 juta unit usaha pertanian perorangan yang menguasai lahan pertanian, namun sebagian besar didominasi oleh petani gurem (lahan < 0,5 ha) yang jumlahnya mencapai 17,25 juta orang (BPS, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa mayoritas petani Indonesia masih berhadapan dengan keterbatasan akses lahan, yang semakin diperburuk oleh tren alih fungsi lahan.

Fenomena berkurangnya luas lahan sawah juga ditemukan dalam berbagai penelitian empiris. Menurut **Warta Perwira (2022)**, antara tahun 2019–2021 Indonesia kehilangan lebih dari **96.500 hektar** lahan sawah produktif. Di tingkat regional, **Handayani dan Wijayanti (2020)** mencatat bahwa di Provinsi Jawa Timur terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi non-pertanian seluas **9.597 hektar** pada periode 2015–2019. Sementara itu, studi oleh **Rustiadi et al. (2018)** dan **Firman (2020)** menunjukkan bahwa alih fungsi lahan bukan lagi fenomena lokal, melainkan *tren struktural nasional* yang dipengaruhi oleh urbanisasi, ekspansi industri, serta lemahnya penegakan kebijakan *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)*. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan kapasitas produksi pangan nasional, meningkatnya ketergantungan terhadap impor, serta melemahnya ketahanan ekonomi petan

Urgensi penelitian ini terletak pada keterkaitannya dengan ketahanan pangan nasional dan agenda pembangunan berkelanjutan. Jika alih fungsi lahan tidak dikelola dengan baik, maka Indonesia berpotensi menghadapi defisit pangan, meningkatnya angka kemiskinan pedesaan, serta melemahnya struktur agraria yang berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis transformasi agraria melalui alih fungsi lahan pertanian, serta implikasinya terhadap kesejahteraan petani, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun ekologi.

Dari sisi ilmiah, penelitian ini berusaha mengisi celah kajian yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek kehilangan produksi pangan semata, tanpa memperhatikan bagaimana alih fungsi lahan berdampak pada kehidupan petani secara lebih luas. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada penghitungan kerugian lahan atau produktivitas, sementara penelitian ini diarahkan untuk menyingkap dimensi sosial dan struktural dari alih fungsi lahan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai dinamika agraria kontemporer di Indonesia sekaligus memberikan pijakan bagi rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada petani dan mendukung agenda kedaulatan pangan.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Desa Rantau Kadam, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam pengalaman, makna, serta dinamika sosial-ekonomi yang dialami petani akibat alih fungsi lahan pertanian. Desain studi kasus memungkinkan analisis lebih rinci mengenai transformasi agraria di satu lokasi spesifik dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, politik, serta budaya yang mengitarinya.

Pemilihan lokasi penelitian didasari oleh beberapa alasan penting. Provinsi Sumatera Selatan dipilih karena berdasarkan data Kementerian Pertanian RI (2023), wilayah ini memiliki laju alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang cukup tinggi, yaitu mencapai sekitar 102.000 hektar per tahun. Kabupaten Musi Rawas Utara dipandang relevan karena berada di jalur perkembangan ekonomi dengan ekspansi perkebunan, infrastruktur, dan permukiman, sehingga menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap lahan pertanian. Sementara itu, Desa Rantau Kadam ditetapkan sebagai lokasi penelitian karena di desa ini terdapat bukti nyata perubahan tata guna lahan, terutama dari sawah dan ladang ke perkebunan maupun permukiman, yang secara langsung memengaruhi kehidupan petani kecil. Selain itu, kondisi sosial-politik di desa relatif kondusif untuk pengumpulan data, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi primer secara komprehensif.

Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk menjangkau pihak-pihak yang relevan. Jumlah informan direncanakan sebanyak 30 orang yang terdiri dari petani pemilik lahan, buruh tani, tokoh masyarakat, aparat desa, perwakilan dinas pertanian atau penyuluh lapangan, hingga aktor pasar dan perwakilan investor lokal. Selain wawancara mendalam, penelitian ini juga menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dengan

kelompok petani dan pemangku kepentingan desa untuk memperoleh gambaran kolektif mengenai dampak alih fungsi lahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, FGD, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menelusuri pengalaman subjektif petani terkait perubahan lahan, pendapatan, dan identitas agraria. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung perubahan fisik penggunaan lahan, aktivitas pertanian, serta interaksi sosial yang terjadi. FGD berfungsi untuk mengidentifikasi pandangan kolektif dan strategi adaptasi masyarakat desa, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen resmi seperti peta RTRW, kebijakan LP2B, data BPN, dan laporan pemerintah desa. Untuk memperkuat temuan, data kuantitatif sederhana juga dikumpulkan melalui kuesioner singkat pada sejumlah petani mengenai kepemilikan lahan, sumber pendapatan, dan luas tanam.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik dengan mengikuti langkah-langkah transkripsi, pengkodean, kategorisasi, dan penarikan tema utama. Analisis kemudian diinterpretasikan dengan menghubungkannya pada teori transformasi agraria, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan dokumen, sementara keabsahan temuan diperkuat dengan deskripsi kontekstual yang kaya. Pertimbangan etis juga diperhatikan, antara lain dengan meminta persetujuan (*informed consent*) dari informan, menjaga kerahasiaan identitas, serta menghindari potensi konflik dalam proses penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Desa Rantau Kadam sebagian besar dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kebutuhan rumah tangga petani. Dari 30 sampel petani yang diwawancarai, sekitar 60% mengalihkan lahannya untuk perkebunan sawit, sementara 30% mengalihfungsikan untuk pemukiman dan usaha kecil, dan sisanya 10% masih mempertahankan lahan pertanian meskipun dengan luas yang semakin berkurang. Fenomena ini memperlihatkan bahwa petani cenderung lebih memilih komoditas yang dianggap memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan stabil dibandingkan dengan tanaman pangan. Namun, alih fungsi lahan ini menimbulkan implikasi serius terhadap ketersediaan pangan lokal dan kesejahteraan jangka panjang petani, karena ketergantungan pada komoditas tunggal (*monokultur*) berisiko terhadap fluktuasi harga pasar.

Secara kualitatif, Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa keputusan petani untuk mengalihkan fungsi lahannya dari sawah ke kebun sawit tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi makro seperti harga komoditas atau tren pasar, tetapi juga oleh kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Sebagian besar petani menyebutkan bahwa biaya pendidikan anak menjadi faktor dominan yang mendorong mereka menjual atau mengonversi lahan sawah. Selain itu, kebutuhan untuk membiayai kesehatan keluarga, terutama ketika ada anggota rumah tangga yang sakit, sering kali menjadi alasan mendesak yang mempercepat keputusan alih fungsi. Di samping itu, kebutuhan konsumtif rumah tangga, seperti renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, atau modal usaha kecil, turut memperkuat pilihan untuk beralih ke sawit yang dianggap lebih menjanjikan

secara finansial dalam jangka menengah. Temuan ini sejalan dengan (Li, 2014) yang menekankan bahwa transformasi agraria sering kali terjadi karena kombinasi antara dorongan struktural pasar dan tekanan kebutuhan rumah tangga. Dengan kata lain, alih fungsi lahan bukan hanya persoalan ekonomi makro, tetapi juga strategi adaptif petani dalam menghadapi tuntutan sosial-ekonomi keluarga.

**Tabel 3.** Alasan Utama Petani Melakukan Alih fungsi Lahan

| Alasan Alih fungsi Lahan              | Jumlah Petani (n=30) | Persentase (%) |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| Biaya pendidikan anak                 | 12                   | 40,00%         |
| Biaya kesehatan keluarga              | 7                    | 23,30%         |
| Kebutuhan konsumtif rumah tangga      | 6                    | 20,00%         |
| Modal usaha/renovasi rumah            | 3                    | 10,00%         |
| Lainnya (mis. faktor sosial, warisan) | 2                    | 6,70%          |
| Total                                 | 30                   | 100,00%        |

Data pada tabel menunjukkan bahwa pendidikan anak menjadi faktor dominan (40%) yang mendorong petani melakukan **alih fungsi lahan**, disusul kebutuhan mendesak untuk biaya kesehatan keluarga (23,3%). Temuan ini memperlihatkan bahwa alih fungsi lahan pada tingkat rumah tangga petani lebih banyak dipicu oleh kebutuhan ekonomi keluarga jangka pendek ketimbang strategi pengelolaan lahan berkelanjutan. Pola ini sejalan dengan temuan Sajogyo (1997) bahwa petani kecil di Indonesia cenderung menggunakan aset lahan sebagai "tabungan terakhir" untuk memenuhi kebutuhan mendesak, khususnya pendidikan dan kesehatan. Penelitian Mulyani & Agus (2017) juga menegaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian sering kali berkorelasi dengan tekanan kebutuhan sosial-ekonomi keluarga, bukan hanya faktor eksternal seperti urbanisasi atau industrialisasi.

Dari perspektif teori, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori kebutuhan dasar (basic needs theory) yang dikemukakan oleh Streeten (1981), di mana keputusan ekonomi rumah tangga petani diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fundamental seperti pendidikan dan kesehatan sebelum mempertimbangkan aspek keberlanjutan produksi. Selain itu, teori livelihood (Scoones, 1998) juga relevan, karena alih fungsi lahan dapat dipahami sebagai strategi livelihood diversification, yaitu upaya rumah tangga petani untuk mengurangi risiko ekonomi dengan mengalihkan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan mendesak.

Implikasinya, meskipun alih fungsi lahan dapat menyediakan solusi instan terhadap tekanan kebutuhan hidup, dalam jangka panjang praktik ini justru melemahkan basis produksi pangan dan mengurangi ketahanan ekonomi rumah tangga petani. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan agraria dan program pemberdayaan perlu memperhitungkan keterkaitan antara kebutuhan mikro rumah tangga (pendidikan, kesehatan) dengan dinamika struktural agraria agar strategi adaptasi petani tidak selalu bermuara pada pelepasan lahan produktif.

Alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah, menjadi salah satu fenomena penting dalam dinamika agraria di Sumatera Selatan. Hasil penelitian lapangan di Desa Rantau Kadam menunjukkan bahwa mayoritas petani telah melakukan alih fungsi lahan ke arah perkebunan sawit (60%), sementara sebagian lainnya mengalihkannya untuk kebutuhan pemukiman dan usaha kecil (30%), dan hanya 10% petani yang masih mempertahankan sawahnya. Temuan ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi ekonomi rumah tangga petani, dari subsistensi berbasis pangan menuju komoditas perkebunan yang dianggap lebih menguntungkan secara finansial. Di sisi lain, wawancara mendalam mengungkapkan bahwa rendahnya produktivitas sawah akibat keterbatasan irigasi dan tingginya biaya produksi menjadi alasan rasional bagi petani untuk melakukan alih fungsi. Kondisi ini selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), yang mencatat tren penurunan produktivitas padi di Sumatera Selatan, sementara luas perkebunan sawit terus mengalami peningkatan. Secara makro, fenomena ini menegaskan adanya pergeseran struktur agraria yang berimplikasi pada berkurangnya basis produksi pangan domestik dan meningkatnya ketergantungan pada komoditas perkebunan sebagai sumber pendapatan.

**Tabel 2.** Distribusi Sampel Petani Berdasarkan Alih Fungsi Lahan di Desa Rantau Kadam

| Jenis Alih Fungsi Lahan    | Jumlah Petani (n) | Persentase (%) |
|----------------------------|-------------------|----------------|
| Perkebunan sawit           | 18                | 60,00%         |
| Pemukiman & usaha kecil    | 9                 | 30,00%         |
| Masih mempertahankan sawah | 3                 | 10,00%         |
| Total                      | 30                | 100,00%        |

Dari tabel di atas terlihat bahwa dominasi alih fungsi lahan menuju perkebunan sawit menunjukkan adanya pergeseran orientasi petani dari ketahanan pangan menuju orientasi pasar. Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa alih fungsi lahan pertanian seringkali dipicu oleh dorongan ekonomi jangka pendek, meskipun berdampak negatif terhadap keberlanjutan pertanian pangan di daerah pedesaan.

Tren terakhir menunjukkan tekanan ganda yakni luas panen padi di Sumatera Selatan cenderung mengalami fluktuasi dan sempat menurun pada 2023, sementara luas areal perkebunan (terutama kelapa sawit) tetap besar dan menunjukkan ekspansi signifikan. Produksi padi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 tercatat sebesar sekitar 2,83 juta ton gabah kering giling (GKG), dengan adanya penurunan luas panen dibanding tahun sebelumnya; pada 2024 tercatat kenaikan luas panen secara keseluruhan. Di sisi lain, luas areal kelapa sawit di provinsi ini berada pada skala ratusan ribu hingga lebih dari satu juta hektar pada data sensus/perkebunan (data perkebunan rakyat dan perusahaan memperlihatkan dominasi komoditas sawit). Temuan ini memperkuat narasi bahwa alih fungsi lahan menuju komoditas/peruntukan non-pangan merupakan faktor penting yang harus dikaitkan dengan kesejahteraan petani di tingkat desa.

Data terbaru menunjukkan bahwa sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan menghadapi dinamika yang cukup kompleks. Pada tahun 2023, produksi padi tercatat sebesar ±2,83 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), yang menegaskan peran provinsi ini sebagai salah satu

lumbung pangan nasional (BPS, 2023). Namun, pada tahun 2024 luas panen padi hanya mencapai 521.092 hektar, angka yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan luas areal perkebunan kelapa sawit yang pada periode yang sama mencapai sekitar 1.268.200 hektar, khususnya dari kategori perkebunan rakyat (BPS Sumsel, 2024). Perbandingan ini memperlihatkan ketidakseimbangan struktural antara sektor pangan dan sektor perkebunan: meskipun produksi padi masih substansial, tekanan terhadap lahan sawah semakin meningkat akibat dominasi ekspansi sawit. Fenomena tersebut konsisten dengan temuan lapangan di Desa Rantau Kadam, Kabupaten Musi Rawas Utara, di mana petani mengonfirmasi adanya pergeseran lahan dari sawah dan ladang menjadi kebun sawit atau area pemukiman. Dengan demikian, data makro BPS memperkuat bukti mikro hasil wawancara dan observasi, bahwa alih fungsi lahan merupakan tren sistematis yang menggeser orientasi agraria dari basis pangan menuju agribisnis perkebunan. Kondisi ini menimbulkan implikasi penting bagi kebijakan agraria, karena berpotensi melemahkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi petani kecil apabila tidak dikelola melalui instrumen perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Desa Rantau Kadam mengalami penurunan motivasi dalam mempertahankan lahan sawah. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas padi yang hanya menghasilkan rata-rata 4–5 ton gabah kering panen (GKP) per hektar, ditambah biaya produksi yang relatif tinggi. Harga gabah yang stagnan juga memperburuk kondisi ekonomi, sehingga lahan sawah tidak lagi dianggap memberikan keuntungan yang memadai. Sebaliknya, komoditas kelapa sawit dinilai lebih menguntungkan karena dapat dipanen secara berkala setiap 10–14 hari dan memberikan pendapatan yang lebih stabil. Temuan mikro ini selaras dengan data sekunder di tingkat provinsi. Berdasarkan data BPS, produksi padi di Sumatera Selatan tahun 2023 mencapai 2,83 juta ton GKG, namun luas panen pada tahun 2024 hanya 521.092 hektar. Sementara itu, luas perkebunan sawit rakyat pada tahun 2024 mencapai 1,268 juta hektar, lebih dari dua kali lipat luas panen padi. Perbandingan ini menunjukkan adanya tekanan struktural terhadap lahan pangan akibat dominasi sawit, yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan di tingkat lokal.

Secara konseptual, fenomena ini dapat dipahami melalui kerangka teori *agrarian transition*. White (2012) menjelaskan bahwa petani kecil secara bertahap mengalihkan orientasi dari produksi subsisten ke produksi berbasis pasar, terutama ketika komoditas perkebunan menawarkan insentif ekonomi yang lebih besar. Zoomers (2010) menegaskan bahwa ekspansi perkebunan komersial cenderung memicu alih fungsi lahan pangan, karena logika keuntungan jangka panjang lebih dominan dibandingkan orientasi ketahanan pangan lokal. Hal ini dipertegas oleh Li (2014), yang menilai bahwa petani seringkali terdorong masuk dalam sistem perkebunan bukan semata-mata berdasarkan pilihan individual, melainkan karena adanya tekanan pasar dan arah kebijakan negara.

Dengan demikian, hubungan antara data mikro dan makro menunjukkan konsistensi pada level lokal, petani menghadapi penurunan keuntungan dari sawah, sedangkan pada level makro, statistik BPS menegaskan adanya pergeseran struktur agraria ke arah dominasi sawit. Temuan ini mendukung pandangan Cochrane (2016) serta Cramb & McCarthy (2016) bahwa ekspansi sawit di

Indonesia tidak hanya mengubah lanskap ekonomi, tetapi juga menggeser fondasi ketahanan pangan dan memperkuat ketergantungan terhadap komoditas global.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Desa Rantau Kadam didorong terutama oleh tekanan ekonomi rumah tangga, dengan mayoritas lahan beralih ke perkebunan sawit (60%) dan sebagian menjadi pemukiman atau usaha kecil (30%), sementara hanya sedikit petani yang tetap mempertahankan sawah (10%). Faktor kebutuhan pendidikan dan kesehatan, ditambah rendahnya produktivitas sawah akibat keterbatasan irigasi serta tingginya biaya produksi, menjadi pendorong utama perubahan penggunaan lahan.

Implikasi penting dari temuan ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Desa Rantau Kadam membawa dampak signifikan terhadap aspek ketahanan pangan, sosial-ekonomi, dan lingkungan. Pergeseran orientasi dari pertanian pangan menuju perkebunan sawit menandakan adanya transformasi ekonomi masyarakat desa yang berfokus pada keuntungan jangka pendek, namun berpotensi mengorbankan keberlanjutan produksi pangan dan fungsi ekologis lahan. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya daya dukung kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) serta kurangnya insentif bagi petani untuk mempertahankan sawahnya. Selain itu, secara sosial, perubahan fungsi lahan juga mengubah struktur sosial masyarakat dari pola gotong royong dalam bertani menjadi pola kerja yang lebih individualistik, sementara secara ekologis berdampak pada penurunan daya serap air, meningkatnya risiko banjir, dan degradasi kualitas tanah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pendekatan *mixed methods* yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika sosial-ekonomi dan ekologi akibat alih fungsi lahan. Secara praktis, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pengendalian konversi lahan melalui pemberian insentif ekonomi bagi petani yang mempertahankan lahan sawah, peningkatan infrastruktur irigasi, serta pengembangan sistem pertanian terpadu berbasis diversifikasi usaha agar pendapatan petani tetap stabil tanpa harus mengorbankan fungsi ekologis lahan pertanian.

## References

- Adriani, Dessy; Purbiyanti, Erni; Novita Sari, M.Hunza, Muhammad; Damayanthi, Dini; Ayu Sulastri, Merna. (2024). *Resources availability and income achievement: A driving force for competitiveness of rice farming products in tidal land, South Sumatera, Indonesia*. Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 327-350
- Afridi, E., Tampubolon, D., & Lapeti Sari. (2024). *Dampak alih fungsi lahan terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi*. Equity: Jurnal Ekonomi, 10(1), 45-59.
- Almas, D., Muhibuddin, A., & Syafri, S. (2025). *Alih fungsi lahan pada sertipikat redistribusi tanah dalam perspektif penyelenggaraan pemanfaatan ruang di Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe, Kabupaten*

- Gowa. Urban and Regional Studies Journal*, 7(2), 103-112. <https://doi.org/10.35965/ursj.v7i2.6057>
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. (2024). *Statistik Perkebunan Rakyat menurut Jenis Tanaman di Sumatera Selatan 2024*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. (2023). *Laporan Produksi Padi dan Luas Panen Padi Sumatera Selatan 2023*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- Cochrane, L. (2016). *Title tentang agrarian change dan sawit (buku atau artikel—contoh)*.
- Cramb, R., & McCarthy, J. (2016). *The political ecology of palm oil expansion in Indonesia*.
- Diana Prafitasari, A., Astuti, A., & Ratri, W. S. (2023). *Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Sleman*. *Jurnal Ilmiah Agritas*.
- Fauzi, S. R., Basri, H., & Helmi, H. (2016). *Kajian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Bireuen*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 4(1), 1-12.
- Khairani, N., & Yusuf, A. M. (2022). *Faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhi alih fungsi lahan pertanian di pedesaan*. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(3), 145-156.
- Lestari, S. D., Syahrani, S., Gunadi, F. A., Kamila, H., & Taqiyya, A. (2024). *Analisis dampak alih fungsi lahan perkebunan menjadi lapangan di Desa Sirnasari*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 23-27. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.1672>
- Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Durham: Duke University Press.
- Mulyani, T., & Agus, S. (2017). *Alih fungsi lahan pertanian dan dampaknya terhadap produksi pangan*. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 35(2), 75-89.
- Sajogyo. (1997). *Agrarian Structure and Social Change in Indonesia*.
- Streeten, P. (1981). *Basic Needs: Premises and Promises*.
- Scoones, I. (1998). *Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis*.
- Surbakti, S., Yanti, M. E., & Nasution, N. (2024). *Analisis alih fungsi lahan padi sawah di Kota Medan*. *Agri Smart Deli Sumatera*, 2(2), 110-123.
- Syahri Ramadhan & Ratna Patmawati Wisnu Murti. (2023). *Dinamika alih fungsi lahan sawah dan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah metropolitan Sarbagita*. *Tunas Agraria*, 7(3), 357-380. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.357>
- Syafri, S., Ridwan, Y., & Nugroho, S. (2022). *Kajian alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non sawah dan lahan terbangun: Kasus Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru*. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian*, 5(1), 118-129
- Utami, D. N., & Sari, R. (2021). *Alih fungsi lahan dan kesejahteraan petani: Studi kasus di Kalimantan Barat*. *Jurnal Agraria dan Pembangunan Wilayah*, 11(2), 77-91.
- Wardhana, A., Setyawan, B., & Firdaus, M. (2020). *Alih fungsi lahan sawah terhadap pendapatan petani di Jawa Timur*. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 34-46
- White, B. (2012). *Agrarian Questions: Contesting the Politics of Knowledge*. London: Routledge.
- Zoomers, A. (2010). *Globalisation and the Foreignisation of Space: The Seven Processes Driving the Current Global Land Grab*. *Journal of Peasant Studies*, 37(2), 429-447.